



PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKALAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Find Us !



@bpkad.bangkalan



(031) 3098579



Jl. Soekarno Hatta No. 35, Mlajah,
Bangkalan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah – Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra dimaksud disusun dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016, yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 - 2045 dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian Visi, Misi Sasaran dan Strategis Pembangunan Kabupaten Bangkalan .

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan ini disusun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Bangkalan, 18 September 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD.....	10
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
a. Tugas Pokok Dan Fungsi	10
b. Sumber Daya PD.....	29
c. Kinerja Pelayanan	33
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	39
b. Isu Strategis	49
BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...	50
3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BPKAD.....	50
3.2 CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	52
3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
BAB V : PENUTUP	85

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, serta mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Renstra merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi

penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD, dan penetapan Renstra PD.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan. Adapun fungsi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan perangkat daerah yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), serta sebagai tolak ukur kinerja dalam melakukan pengendalian dan evaluasi capaian tujuan perangkat daerah

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu unsur perangkat daerah, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas yang sekarang maupun yang akan datang, sehingga dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai. Selain itu juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dan mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya dalam jangka waktu tiga tahun kedepan, sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan disusun atas dasar:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
-

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587) Perubahan terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomoi 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 Nomor 5/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/8/433.201/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
20. Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/5/433.000/2025 Tentang Finalisasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan tahun 2025 – 2029 adalah :

- 1 Untuk menjabarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta berbagai program dan kegiatan beserta indikator kinerja BPKAD Kabupaten Bangkalan periode 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2025-2029;
-

- 2 Pedoman bagi aparaturnya dalam penyelenggaraan program dan pembangunan, di bidang pengelolaan keuangan agar dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan selama kurun waktu tiga tahun ke depan;
- 3 Menetapkan skala prioritas yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua stakeholders dalam mengembangkan pengelolaan keuangan;
- 4 Menyusun instrumen/alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dan membuat tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan kepada Bupati Bangkalan;
- 5 Menyelaraskan beberapa indikator kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Sedangkan Tujuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD);
2. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk di jabarkan dalam rencana kerja tahunan.
3. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan antara 2025-2029.
4. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari latar belakang, keterkaitan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dinilai perlu untuk diatasi.

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Kelompok Sasaran Layanan.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan Isu-isu strategis.

- a. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah);
- b. Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas Daerah;
- c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. Penentuan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tentang tujuan, sasaran jangka menengah strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
 - 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
 - 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
-

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan.

BAB V P E N U T U P

Bab ini berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

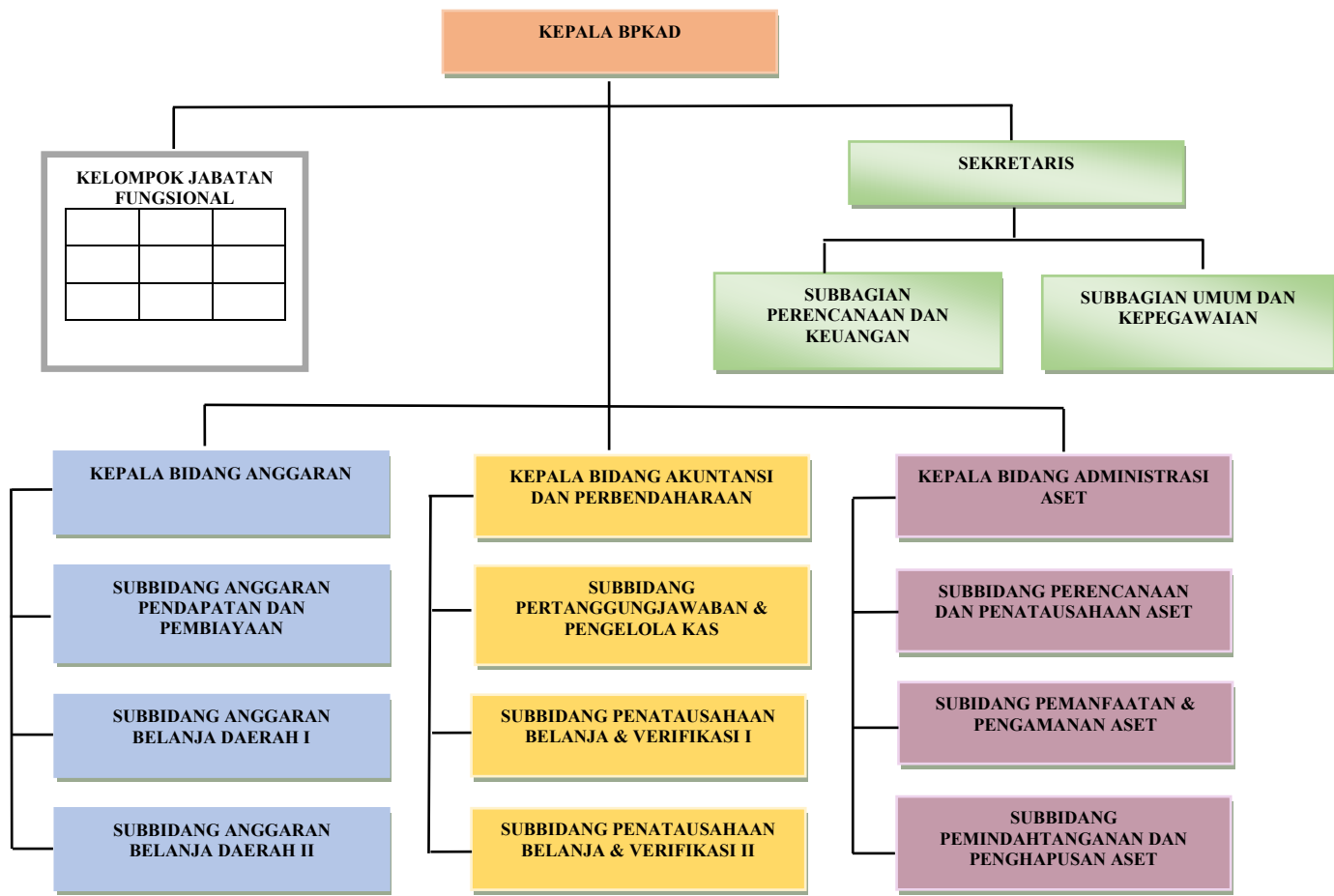
Secara esensial, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, telah ditetapkan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, diantaranya tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
-



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Selain dari pada itu, substansi berikutnya yang dapat dikemukakan dalam lingkup ini adalah susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan yang dirumuskan dalam susunan sebagai berikut :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat;
- 3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan ;
- 4. Bidang Anggaran ;
- 5. Bidang Administrasi Aset;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dan Bidang sebagaimana dikemukakan diatas, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Memperhatikan informasi lebih detail, dapat pula dikemukakan beberapa informasi sebagai berikut :

(1) Sekretariat

- a. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program dan keuangan,
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sekretariat ;
 - 2) Mengkoordinasi Penyusunan Rencana Program Kerja Sekretariat ;
 - 3) Membina dan memberi dukungan Administrasi yang meliputi Ketata Usahaan , Kepegawaian, Keuangan, Kerumah tanggaan, Kerja sama, Hubungan Masyarakat,Arsip dan Dokumentasi.
 - 4) Pembinaan dan Penataan Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana ;
 - 5) Mengkoordinasi dan Menyusun Peraturan Perundang-undangan ;
 - 6) Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 - 7) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- d. Secara operasional, Sekretariat dibantu oleh beberapa unsur yang meliputi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- e. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dikemukakan diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Ditinjau dari aspek internal, Sekretariat dibantu oleh:

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan Penyusunan rencana kerja kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Melakukan Penyiapan bahan dalam rangka Perumusan Kebijakan program dan Pelaporan ;
 - c. Melakukan Penyusunan Anggaran;
 - d. Melakukan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan ;
 - e. Melakukan Pelaksanaan Akuntansi dan Verifikasi Keuangan ;
 - f. Melakukan Kegiatan Perbendaharaan,Pengelola Penerimaan daerah bukan pajak dan Pelaporan Keuangan ;
 - g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan Evaluasi Realisasi Anggaran ;
 - h. Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan :
-

- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta laporan Kegiatan ;
- j. Melakukan Penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan ;
- k. Menyusun Rencana Startegis,Rencana Kinerja,Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ,Perjanjian Kinerja ;
- l. MelaksanakanDokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- m.Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ; dan
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Daerah;
- d. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan
- e. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- f. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi public;
- h. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. Melaksanakan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. Melaksanakan system Pengendalian Intern (SPI); dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

(2) Bidang Anggaran.

- 1. Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :
-

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan.
 - c. Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD
 - d. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - e. Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - i. Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
 - j. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
 - k. Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- 2.1 Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan pembiayaan menjalankan fungsi :
-

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
 - c. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan SKPKD pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - i. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
 - k. Menyiapkan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
 - l. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
 - m. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
-

- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2 Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I

Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
 - b. Menatausahakan rencana anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - c. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - d. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data belanja dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan konsep nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
 - i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan jawaban ekskutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
-

- j. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- k. Menyiapkan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- l. Melakukan pembinaan penyusunan anggaran BLUD;
- m. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD;
- n. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- o. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2.3 Analis Anggaran Ahli Muda

Analis Anggaran Ahli Muda mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. Menatausahakan rencana anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
 - c. Menyiapkan bahan inventarisasi, mendistribusikan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
 - d. Menyiapkan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data belanja dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD SKPD Dinas dan kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan konsep nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
-

- g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja sebagai dasar pelaksanaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kompilasi bahan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- j. Menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan penerbitan SPD sebagai fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan kredit anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD Dinas dan kecamatan;
- m. Melaksanakan pengembangan dan budaya kreatifitas pemuda;
- n. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- o. Menyusun dan melaksanakan standar pelaksanaan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI) dan;
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(3) Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

- 1. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang akuntansi dan perbendaharaan;
 - 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang akuntansi dan perbendaharaan;
 - b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - d. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
-

- e. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Sub Bidang Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang pertanggungjawaban dan pengelolaan kas;
 - b. Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - c. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
 - d. Memeriksa, menganalisis, mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas;
 - e. Menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - g. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - i. Menyusun dan menyediakan penyusunan neraca, laporan arus kas pelaksanaan APBD secara periodik;
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja keuangan pemerintah kabupaten;
 - k. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - l. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban fungsional;
-

- m. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan barang daerah;
- n. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- o. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasinal prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3.2 Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bidang penatausahaan belanja dan verifikasi I;
 - b. Melaksanakan register atas surat perintah membayar (SPM) dan SP2D belanja pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - e. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - f. Melaksanakan pengadministrasian, pemungutan, dan pemotongan PFK pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 - i. Meneliti kelengkapan dokumen dan menyiapkan draf SKPP pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
-

- j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan pada SKPD Inspektorat, Badan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
- l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3.3 Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. Melaksanakan register atas surat perintah membayar (SPM) dan SP2D belanja pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar penguji SP2D pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - e. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - f. Melaksanakan pengadministrasian, pemungutan, dan pemotongan PFK pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - i. Meneliti kelengkapan dokumen dan menyiapkan draf SKPP pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan pada SKPD Dinas dan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA);
 - l. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP);
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
-

(4) Bidang Administrasi Aset

1. Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang administrasi asset;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang administrasi asset mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang administrasi asset;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - d. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
 - e. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset, mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
 - c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
 - d. Mengumpulkan koordinasi pembinaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
 - e. Menyusun laporan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
 - f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, penatausahaan dan akuntansi aset daerah;
 - g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian dan penyusun laporan mutasi barang, laporan bersedian barang, laporan pengadaan barang;
 - h. Menyiapkan dan menyusun laporan milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
 - i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan
-

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.2 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
- b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- e. Melaksanakan proses administrasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah;
- i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

4.3 Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - b. Mengumpulkan bahan perumusan kebijakan administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan
-

- tuntutan ganti rugi;
- c. Mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi pembinaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - d. Melaksanakan koordinasi pembinaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - e. Melaksanakan proses administrasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - f. Mengumpulkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - g. Mengumpulkan, penganalisaan, pengevaluasian, dan penyusunan laporan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan tuntutan ganti rugi;
 - i. Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - j. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern (SPI);
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
 - b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
 - c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - d. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
-

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM). Pada suatu organisasi Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 memiliki kekuatan personil sebanyak 67 orang, terdiri dari 58 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang THL/PTT-PK dan 4 orang kontrak, dimana secara spesifik dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang sebagai berikut :

- a) Jumlah aparat dalam Jabatan Struktural
 - 1) Pejabat Eselon II/a = - orang
 - 2) Pejabat Eselon II/b = 1 orang
 - 3) Pejabat Eselon III/a = 1 orang
 - 4) Pejabat Eselon III/b = 3 orang
 - 5) Pejabat Eselon IV/a = 7 orang
 - 6) Pejabat Eselon IV/b = - orang
 - b) Jumlah aparat ditinjau dari Pangkat/ Golongan Ruang
 - 1) Pembina Utama (IV/e) = - orang
 - 2) Pembina Utama Madya (IV/d) = - orang
 - 3) Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang
 - 4) Pembina Tingkat I (IV/b) = 1 orang
 - 5) Pembina (IV/a) = 3 orang
 - 6) Penata Tk. I (III/d) = 20 orang
 - 7) Penata (III/c) = 10 orang
 - 8) Penata Muda Tk. I (III/b) = 7 orang
 - 9) Penata Muda (III/a) = 11 orang
 - 10) Pengatur Tk I (II/d) = - orang
 - 11) Pengatur (II/c) = 3 orang
 - 12) Pengatur Muda Tk. I (II/b) = - orang
 - 13) Pengatur Muda (II/a) = - orang
 - 14) Juru Tingkat I (I/d) = - orang
 - 15) Juru (I/c) = - orang
 - 16) Juru Muda Tingkat I(I/b) = - orang
 - 17) Juru Muda (I/a) = 1 orang
-

- 18) PPPK = 5 orang
- 19) Tenaga Harian Lepas (THL) = 5 orang

c) Jumlah aparat ditinjau dari aspek pendidikan

- 1) Pasca Sarjana (S2) = 10 orang
- 2) Sarjana = 44 orang
- 3) Diploma III = - orang
- 4) Diploma II = - orang
- 5) Diploma I = - orang
- 6) SLTA = 4 orang
- 7) SLTP = - orang
- 8) SD = - orang

Meskipun tingkat pendidikan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sarana Dan Prasarana

Adapun Asset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangkalan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Badan adalah sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Ket
1	2	3	5	4	6
1	Kendaraan roda 4	18	18	-	
2	Kendaraan roda 2	15	15	-	
3	Headmachine Besar	2	2	-	
4	Alat Pelobang (Cork Borer)	2	2	-	
5	Alat Pemadam/Portable	5	5	-	
6	Alat Pemotong Kertas	2	2	-	
7	Alat Penghancur Kertas	5	5	-	
8	Bangku Tunggu	2	2	-	
9	Brankas	3	3	-	
10	Camera Digital	3	3	-	
11	Komputer PC. Unit	41	41	-	
12	Laptop	13	13	-	
13	Notebook	12	12	-	
14	Hard Disk	11	11	-	
15	Monitor	1	1	-	
16	Printer	27	27	-	
17	UPS	10	10	-	
18	Scanner	5	5	-	
19	Televisi	4	4	-	

20	Handi Cam	1	1	-	
21	Loudspeaker	1	1	-	
22	Sound System	3	3	-	
23	Seterika	1	1	-	
24	Mesin Absensi	2	2	-	
25	Lemari Es	1	1	-	
26	Sofa	2	1	-	
27	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	
28	Filling Cabinet Besi	17	17	-	
29	Meja ½ Biro	15	15	-	
30	Meja Kerja Kayu	18	18	-	
31	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	7	-	
32	Meja Panjang	1	1	-	
33	Meja Tulis	5	5	-	
34	Kursi Besi/Metal	149	149	-	
35	Kursi Biasa	5	5	-	
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	-	
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7	7	-	
39	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	13	13	-	
40	Rak Kayu	5	5	-	
41	TeleponTangga Aluminium	1	1	-	
42	Tablet PC	5	5	-	
TOTAL		447	447	-	

Sumber Data : Bidang Admnistrasi Aset Tahun 2024

Kondisi sarana dan prasarana di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan cukup beragam dan sebagian besar dalam kondisi baik. Meskipun demikian terdapat pula sarana dan prasarana yang kurang baik kondisi maupun jumlahnya. Melihat kondisi padatnya pekerjaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai dan masih banyaknya pegawai yang menggunakan *private computer (pc)*, serta sedikitnya jumlah *scanner* dan *printer* yang dalam kondisi baik. Hal tersebut menghambat kegiatan operasional dalam pencapaian kinerja pelayanan sehingga dibutuhkan pendanaan atau alokasi anggaran untuk mendanai pengadaan *computer*, *scanner* dan *printer*. Selain itu perkembangan teknologi informasi meningkatkan penggunaan sarana teknologi informasi berupa aplikasi *zoom meeting* guna memudahkan penyelenggaraan kinerja yang diselenggarakan secara *virtual*. Dalam rangka mendukung kepentingan tersebut diperlukan adanya pendanaan

terkait pengadaan kamera dengan spesifikasi yang memadai dan peralatan lainnya yang dibutuhkan.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan PD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pelayanan Bidang Administrasi Aset terhadap sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dalam hal legalisasi atau sertifikasi aset daerah serta penghapusan aset daerah yang harus dihapus masih belum terealisasi secara maksimal di setiap Perangkat Daerah. Untuk mendukung optimalnya penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah diperlukan adanya kerjasama yang baik dari pihak terkait, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

Adapun pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPKAD selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 disajikan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BPKAD	Target SPM	Target IKK	Targ et Indi kato r Lain nya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Tahun					Rasio/ Capaian Pada Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-		-					WTP					WTP					WTP
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan (SAP)	-	-	-					100					100					100
3	Persentase OPD yang terib administrasi pengelolaan barang milik daerah								100					100					100
4	Terpenuhinya pelayanan kesekretariat an								100					100					100
5			Opini terhadap Laporan Keuangan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Berdasarkan tabel 2.1 tentang pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Bangkalan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Pencapaian kinerja pada indikator tujuan BPKAD pada tahun 2020-2024 adalah 100% karena selama periode tersebut BPKAD telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar akutansi pemerintahan (SAP)
Pencapaian kinerja pada indikator sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yaitu persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai Standar Akutansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Sebanyak 52 OPD melaksanakan

tata kelola keuangan sesuai ketentuan dari total seluruh OPD di Bangkalan yaitu sebanyak 52 OPD, artinya seluruh OPD telah memenuhi tata kelola keuangan sesuai ketentuan.

3. Persentase OPD yang terib administrasi pengelolaan barang milik daerah

Pencapaian kinerja pada indikator sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yaitu persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2020-2022 adalah 100% karena 52 OPD telah memenuhi tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Bangkalan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang disajikan dalam tabel 2.1 tidak dapat tercapai tanpa adanya anggaran atau pendanaan yang dapat memenuhi seluruh kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi.

Adapun anggaran dan realisasi pelayanan BPKAD selama periode Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio/ Capaian antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					440.333.424.961					439.482.645.302					100	.	.
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					803.035.850					493.776.402					61.49	.	.

Berdasarkan tabel 2.1 tentang pencapaian kinerja pelayanan BPKAD dan tabel 2.2 tentang realisasi pendanaan pelayanan BPKAD dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan proses perencanaan dan

penganggaran diperlukan adanya analisis secara menyeluruh mengenai penetapan anggaran prioritas, *mandatory* dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan sehingga target Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan BPKAD Kabupaten Bangkalan selama periode 2020 – 2024 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak lepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas. Penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin kompleks.
 2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja, serta tanggung jawab terhadap tupoksi.
 3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan terutama pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar PD masih belum dapat dilakukan lebih intens.
 5. Belum Optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti Workshop, Diklat dan Bimtek baik formal ataupun informal. Karena intensitas dan ritme kerja BPKAD yang relatif tinggi.
 6. Belum maksimalnya pelayanan Bidang Administrasi Aset terhadap sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset dalam hal legalisasi atau sertifikasi aset daerah serta penghapusan aset daerah yang harus dihapus di setiap Perangkat Daerah.
 7. Belum adanya gudang arsip yang memadai sehingga dokumen BPKAD dari tahun-tahun sebelumnya menumpuk di beberapa ruangan yang mengganggu kenyamanan pegawai dalam memberikan pelayanan kinerja.
 8. Kurangnya alokasi anggaran dalam pengadaan peralatan guna menunjang kegiatan operasional Perangkat Daerah seperti kamera, *computer*, *printer*, *scanner*, pemeliharaan *air conditioner (ac)* dan kebutuhan lainnya.
 9. Kurangnya inovasi dalam mendukung pencapaian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel
-

d. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Bangkalan Nomor : 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, telah ditetapkan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan, diantaranya tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan. Selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BPKAD juga menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Artinya, BPKAD berperan sebagai koordinator dari seluruh SKPD di Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, kelompok sasaran BPKAD dalam memberikan pelayanannya adalah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 52 Perangkat Daerah.

Pada aspek keuangan Perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian indikator dari aspek ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, **adapun capaian indikator yang telah dicapai dari tahun 2020-2024 adalah**

Tabel 2.2.1
Capaian Indikator

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Proporsi PAD terhadap pendapatan Daerah	10.9 %	11.94 %	12.70 %	17.13 %	17.10 %
3	Pertumbuhan PAD	-11.09 %	16.50 %	3.76 %	38.57 %	57.91 %

Terdapat 3 indikator yang menjadi tolak ukur kinerja keuangan Kabupaten Bangkalan, indikator yang pertama adalah *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)*, Kabupaten Bangkalan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 Tahun berturut-turut, artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkap secara wajar dan berkualitas.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan pada tahun 2024 – 2026, maka perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang Akuntabel, Berintegritas, Efektif, Kompeten, Transparan, Efisien dengan berbasis teknologi Informasi dan dibutuhkan solusi – solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama 5 tahun mendatang.

Adapun permasalahan secara umum yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan

terutama tempat kerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari gudang arsip atau penyimpanan dokumen, kamera, *computer*, *printer*, *scanner* dan pemeliharaan *air conditioner (ac)* dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja pada sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah khususnya dalam pensertifikatan aset milik daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD);

- 4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan

- 5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

- 6) Kurangnya dukungan sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi
-

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya dukungan pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang belum diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di periode lima tahun mendatang. Maka isi-isu strategis utama yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
 2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
 3. Perlu adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah.
 4. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas
-

Tabel 2.3
Isu Strategis PD

No	Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan transformasi pelayanan publik	Kemajuan teknologi keuangan dan perubahan kebijakan fiskal	Tantangan dalam tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal	Perlu adanya peningkatan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan
		Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas		Potensi kerentanan infrastruktur keuangan dan keamanan siber	Lemahnya tata kelola data yang akan memengaruhi pelaksanaan pembangunan ke depan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.	Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
		Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah				Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan	Perlu adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia
		Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah					Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas
		Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah					
		Kurangnya dukungan sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel”

B. Sasaran Renstra PD Kabupaten Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran Organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel “

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan public prima berbasis digital dengan ASN yang professional	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

		Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,5	2	2	2	2	2
			Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	31%	61%	86%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	95	95	95	95	95	95

Tabel 3.2
Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan perencanaan TataKelola Keuangan dan kebutuhan Barang Milik Daerah;	Percepatan penertiban pencatatan Persediaan dan Pelaporan BMD tepat waktu.	Optimalisasi Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis elektronik.	Evaluasi Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis elektronik.	SDM handal dengan kapasitas mandiri dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

C. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Maka dalam upaya mendukung tujuan Perangkat daerah, BPKAD menetapkan motto *”Bersinergi mewujudkan Good Governance yang efektif Responsif, Akuntabel yang Kompeten (Bergerak)”*

Dari motto ini bisa dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersinergi
 - a. Bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah mencapai tujuan bersama
 - b. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
 2. Good governance
 - a. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Pelayanan publik tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - c. Merintegritas menjunjung tinggi nilai kejujuran, mandiri, dan tanggungjawab
 3. Efektif
 - a. Penggunaan keuangan daerah dan barang milik daerah secara tepat
 - b. Fokus pada prioritas dan hasil (money follow program)
 - c. Terwujudnya pola dan sistem kerja yang efisien, mudah, cepat dan tepat
 4. Responsif
 - a. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, saran dan pengaduan
 - b. Cepat merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang cepat dan tepat
 - c. Adaptif terhadap perkembangan zaman
 5. Akuntabel
 - a. Menggunakan keuangan daerah dan barang milik daerah secara bertanggungjawab, efektif dan efisien
 - b. Tidak menyalahgunakan wewenang jabatan
 - c. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
 6. Kompeten
 - a. Mempunyai kemampuan dan kapabilitas yang handal
 - b. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - c. Membantu orang lain belajar
-

D. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Arah Kebijakan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
		Penguatan pondasi Infrastruktur dasar berkelanjutan menuju Transformasi Daya Saing Sosial Ekonomi Inklusif berbasis IPTEK dan Inovasi.	Penerapan Penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga	Sudah selaras
			Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	
			Peningkatan kompetensi pengelolaan aset daerah, peningkatan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah	

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Religius, Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera				
Misi 4 : Penyelenggaraan birokrasi yang prima, berkualitas, dan transparan				
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Kebijakan PD	
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran	Penerapan Penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.	Program Pengelolaan Keuangan
		Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar Akutansi Pemerintahan (SAP)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Meningkatkan pengadministrasian aset daerah	Peningkatan kompetensi pengelolaan aset daerah, peningkatan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengoptimalkan sumberdaya kelembagaan untuk menunjang tercapainya kinerja Perangkat Daerah	Memberikan pelayanan yang optimal di internal Perangkat Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Rencana Program merupakan implementasi dari visi dan misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan dalam lima tahun ke depan. Program dan kegiatan direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan d.alam kerangka konseptual serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bangkalan, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan diperlukan adanya alokasi anggaran yang mampu mendanai seluruh program dan kegiatan sehingga tujuan BPKAD dapat terlaksana dan memenuhi target yang ingin dicapai.

Adapun rencana program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan adalah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bangkalan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	560.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	110.000.000	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	-	10.000.000	164 orang	10.000.000	164 orang	10.000.000	164 orang	10.000.000	164 orang	10.000.000	164 orang	10.000.000	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70	80	34.318.738.614	80	41.416.994.614	80	45.416.994.614	80	58.694.549.406	80	71.198.826.974	80	71.198.826.974	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92	95	3.463.931.315	95	3.663.931.000	95	3.663.931.000	95	3.863.931.000	95	3.813.931.000	95	3.813.931.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	82	95	37.782.669.929	95	45.080.925.614	95	49.080.925.614	95	62.558.480.406	95	75.012.757.974	95	75.012.757.974	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	19.265.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	100%	24.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.735.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-	1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	

	SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.735.000	6 Laporan	3.500.000	6 Laporan	3.500.000	6 Laporan	3.500.000	6 Laporan	3.500.000	6 Laporan	3.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	2.735.000	8 Laporan	3.500.000	8 Laporan	3.500.000	8 Laporan	3.500.000	8 Laporan	3.500.000	8 Laporan	3.500.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	120.000	1 Data	0	1 Data	0	1 Data	0	1 Data	0	1 Data	0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah terlayani tepat waktu	100%	100%	33.686.708.614	100%	40.786.494.614	100%	44.786.494.614	100%	58.064.049.406	100%	70.568.326.974	100%	70.568.326.974	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	33.681.238.614	58 Orang/bulan	40.779.494.614	58 Orang/bulan	44.779.494.614	58 Orang/bulan	58.057.049.406	58 Orang/bulan	70.561.326.974	58 Orang/bulan	70.561.326.974	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.735.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	3.500.000	2 Laporan	3.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.735.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	4 Laporan	3.500.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	100%	5.470.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.735.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	2.735.000	14 Laporan	3.500.000	14 Laporan	3.500.000	14 Laporan	3.500.000	14 Laporan	3.500.000	14 Laporan	3.500.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	100%	17.880.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.880.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	67 Orang	4.000.000	67 Orang	4.000.000	67 Orang	4.000.000	67 Orang	4.000.000	67 Orang	4.000.000	67 Orang	4.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000	100%	276.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	60.000.000	18 Paket	60.000.000	18 Paket	60.000.000	18 Paket	60.000.000	18 Paket	60.000.000	18 Paket	60.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000
Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	5 Unit	45.000.000	6 Unit	45.000.000	6 Unit	45.000.000	6 Unit	45.000.000	6 Unit	45.000.000	6 Unit	45.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	3.542.858.315	100%	3.663.931.000	100%	3.663.931.000	100%	3.863.931.000	100%	3.813.931.000	100%	3.813.931.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	3.270.508.315	4 Laporan	3.391.581.000	4 Laporan	3.391.581.000	4 Laporan	3.591.581.000	4 Laporan	3.541.581.000	4 Laporan	3.541.581.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100%	189.488.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	70.450.000	22 Unit	90.000.000	22 Unit	90.000.000	22 Unit	90.000.000	22 Unit	90.000.000	22 Unit	90.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	50.488.000	51 Unit	70.000.000	51 Unit	70.000.000	51 Unit	70.000.000	51 Unit	70.000.000	51 Unit	70.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	167 Unit	38.550.000	167 Unit	50.000.000	167 Unit	50.000.000	167 Unit	50.000.000	167 Unit	50.000.000	167 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	
				493.433.564.912		516.002.397.197		526.441.238.597		546.486.412.389		565.639.661.957		565.639.661.957	

Berdasarkan tabel 4.1 di atas yang menjadi prioritas berdasarkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Pelayanan publik prima berbasis digital dengan ASN Yang profesional	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel			Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu		
					Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		
					Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal		
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Persentase alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
					Persentase Penurunan SILPA		
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat waktu		
				Dokumen	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	

						SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
				Dokumen	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	

				Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Dokumen	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
				Dokumen	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
				Laporan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

				Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Laporan	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	
				Laporan	Jumlag Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggara an Urusan				Nilai Sakip Perangkat Daerah		
					Indeks Kepuasan Masyarakat		

	Keuangan						
			Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah terlayani tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Org/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	

					Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
					Persentase Layanan Administrasi Umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
				Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

					Persentase Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Prosentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang anggaran dan kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan. Kegiatan dari bidang anggaran yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. Sub kegiatan tersebut menjadi prioritas karena APBD yang tersusun menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja.

Adapun kegiatan dari bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi prioritas yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi prioritas sebab LKPD merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur capaian kinerja dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan anggaran tersebut diharapkan dapat mendanai setiap kegiatan sesuai dokumen perencanaan sehingga tujuan BPKAD dalam rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat tercapai.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi prioritas adalah kegiatan dari bidang administrasi aset pada sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik

Daerah. Sub kegiatan ini menjadi prioritas karena pentingnya legalisasi aset tanah milik Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dan mengoptimalkan pengelolaan tanah sebagai aset milik pemda guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekapitulasi tanah dalam rangka legalisasi atau sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3.1
Rekapitulasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten
Bangkalan

No.	Uraian	Jumlah Aset	Sudah Sertifikat	Belum Bersertifikat
	Tahun 2023	1826	571	1225
1.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	1	1	-
2.	Tanah	6	2	4
3.	Tanah Hutan Lindung	1	-	1
4.	Tanah Jalan	2	-	2
5.	Tanah Jaringan/Saluran	70	-	70
6.	Tanah Kampung	16	12	4
7.	Tanah Kebun	3	-	3
8.	Tanah Komplek Bendungan	4	-	4
9.	Tanah Kosong	3	1	2
10.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	86	61	25
11.	Tanah Lapangan	17	9	8
12.	Tanah Sawah	92	53	39
13.	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	1	-	1
14.	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2	1	1
15.	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	1	1	-
16.	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Baku	28	1	27
17.	Tanah Untuk Bangunan Rumah Adat	1	1	-
18.	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	6	-	6
19.	Tanah Untuk Jalan	7	2	5
20.	Tanah Untuk Jalan Desa	5	-	5
21.	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	171	6	165
22.	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	34	4	-
23.	Tanah Untuk Jembatan	1	-	1
24.	Tanah Usaha	17	-	17
25.	Tanah Waduk	2	1	1
26.	Lain-Lain	9	2	7
27.	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	1	1	-
28.	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun	5	5	-
29.	Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan	1	-	1
30.	Tanah Bangunan Industri Industri Lainnya	1	-	1
31.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	97	63	34
32.	Tanah Bangunan Laboratorium	3	1	2
33.	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1	-	1
34.	Tanah Bangunan Olah Raga	1	1	
35.	Tanah Bangunan Pasar	44	22	22
36.	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	834	229	605
37.	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	8	-	8

38.	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	31	2	29
39.	Tanah Bangunan Poliklinik	2	2	
40.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	2	-	2
41.	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	106	40	66
42.	Tanah Bangunan Rekreasi	3	3	-
43.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2	2	-
44.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	65	27	38
45.	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	3	2	1
46.	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	1	-	1
47.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2	1	1
48.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	27	12	15

Sumber Data: Bidang Administrasi Aset BPKAD Kab. Bangkalan, 2023

Berdasarkan data rekapitulasi aset pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan atau selisih pada kategori Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek yang mana dari 34 bidang atau lahan hanya menjadi 4 sertifikat karena pembebasan tanahnya terdiri dari beberapa orang. Selain itu, pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa pada awal tahun 2023 masih terdapat 1225 bidang yang belum bersertifikat. Oleh karena itu, target sertifikasi yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.2
Target Sertifikasi Bidang Milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan

No.	Tahun	Bidang Belum Bersertifikat	Target Sertifikasi Bidang	Sisa Bidang Belum Bersertifikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	2023	1225	57	1168
2.	2024	1168	290	878
3.	2025	878	441	437
4.	2026	437	437	0

Berdasarkan data dari Bidang Administrasi Aset Kabupaten Bangkalan diketahui bahwa sebanyak 1826 bidang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bidang tersebut terdiri dari 571 bidang yang telah bersertifikat dan 1225 bidang belum bersertifikat. Dalam rangka pengamanan Aset Daerah terhadap 1826 bidang tersebut, diperlukan adanya pengamanan dengan melakukan pemasangan papan nama dan pagar pada bidang.

B. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kelompok Prioritas Utama

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Daerah dalam RKPD 2026	Ket

Table 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	34.25	34.25	30	30	30	30
3	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0.15	3.5	7	13	18	2,00

Table 4.6
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	33,56	34,25	34,25	30	30	30
3	Persentase alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	37,76	19,38	40	40	40	40
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	80	85	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan SILPA	Persen	15	14	12	10	8	8
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	0,15	3,50	7	13	18	18

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

Namun meskipun demikian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terukur dan akuntabel sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025-2029.

Bangkalan, 18 September 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra
Perangkat DaerahKabupaten Bangkalan

NO	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjuti Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Pembentukan tim penyusun PerubahanRenstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Penyiapan data dan informasi	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	√			
5	Penelaahan Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan isu - isu strategis	√			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangkamenengah daerah		√		
10	Perumusan tujuan pelayanan jangkamenengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangkamenengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu Rancangan Awal RJMD Kabupaten/Kota yang memuat Indikator keluaran program dan Pagu per - Perangkat Daerah	√			
13	Perumusan Strategis dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota guna mencapai terget kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas danfungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
14	Perumusan Rancana Program, kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran danpendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun , termasuk lokasi kegiatan	√			
15	Perumusan indikator kinerja PerangkatDaerah Kabupaten/Kota yang mengacupada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			

NO	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjuti Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah Kabupaten/Kotaberpedoman pada indikasi rancanaprogram prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18	Perumusan rancangan Akhir RenstraPerangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaanprogram pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten/Kota	√			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan		√		

Bangkalan, 18 September 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**



AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003

Formulir E. 80 Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan
Periode Pelaksanaan: 2024 – 2026

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kab/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten: Bangkalan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	100%	4.200.896.990	100%	1.285.225.990	100%	1.457.835.500	100%	1.457.835.500	100%	1.234.890.000	100%	753.301.875			100%	780	100%	326			BPKAD
			Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	1.262.834.981.442	100%	431.160.615.476	100%	415.837.182.983	100%	415.837.182.983	100%	438.554.571.870	100%	819.378.832.677			100%	961	100%	355			BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	100%	100%	4.200.896.990	100%	1.285.225.990	100%	1.457.835.500	100%	1.457.835.500	100%	1.234.890.000	100%	753.301.875			100%	780	100%	326			
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	81.665.000	2 Dokumen	20.965.000	2 Dokumen	30.350.000	2 Dokumen	30.350.000	2 Dokumen	20.496.000	2 Dokumen	12.321.000			2 Dokumen	97,76	2 Dokumen	40,60			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	81.665.000	2 Dokumen	20.965.000	2 Dokumen	30.350.000	2 Dokumen	30.350.000	2 Dokumen	20.566.000	2 Dokumen	12.279.375			2 Dokumen	98,10	2 Dokumen	40,46			
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	3 Dokumen	51.000.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	14.250.000	1 Dokumen	14.250.000	1 Dokumen	22.446.000	1 Dokumen	3.010.000			1 Dokumen	99,76	1 Dokumen	21,12			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	3 Dokumen	42.000.000	1 Dokumen	13.500.000	1 Dokumen	14.250.000	1 Dokumen	14.250.000	1 Dokumen	13.026.000	1 Dokumen			1 Dokumen	96,49	1 Dokumen					
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	3 Dokumen	107.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	43.750.000	1 Dokumen	43.750.000	1 Dokumen	19.950.000	1 Dokumen	24.864.000		1 Dokumen	99,75	1 Dokumen	56,83				
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	3 Dokumen	77.175.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	38.587.500	1 Dokumen	38.587.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen					
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	6 Dokumen	1.333.687.000	2 Dokumen	443.687.000	2 Dokumen	445.000.000	2 Dokumen	445.000.000	2 Dokumen	422.990.000	2 Dokumen	382.485.000		2 Dokumen	95,34	2 Dokumen	85,95				
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	6 Dokumen	1.270.362.000	2 Dokumen	420.362.000	2 Dokumen	425.000.000	2 Dokumen	425.000.000	2 Dokumen	401.333.000	2 Dokumen	103.682.500		2 Dokumen	95,47	2 Dokumen	24,40				
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	3 Dokumen	1.081.982.990	1 Dokumen	323.246.990	1 Dokumen	379.368.000	1 Dokumen	379.368.000	1 Dokumen	314.083.000	1 Dokumen	214.660.000		1 Dokumen	97,17	1 Dokumen	56,58				
		Koordinasi Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	3 Dokumen	26.930.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.465.000	1 Dokumen	13.465.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	26.930.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13.465.000	1 Dokumen	13.465.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen				
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen				
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	272.000.000	100%	72.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	71.093.000	100%	19.857.850			100%	396	100%	183			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	33.850.000	2 Dokumen	13.850.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	13.850.000	2 Dokumen	10.722.650			2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	107,23			
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	6 Dokumen	54.836.000	2 Dokumen	24.836.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	23.936.000	2 Dokumen				2 Dokumen	96,38	2 Dokumen				
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen				2 Dokumen		2 Dokumen				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	6 Dokumen	38.770.000	2 Dokumen	18.770.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	18.763.000	2 Dokumen	4.570.150			2 Dokumen	99,96	2 Dokumen	45,70			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	3 Laporan	44.544.000	1 Laporan	14.544.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	14.544.000	1 Laporan				1 Laporan	100,00	1 Laporan	0,00			
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	4.565.050			2 Dokumen	-	2 Dokumen	30,43			
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen				2 Dokumen		2 Dokumen				
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	100%	243.472.350	100%	43.472.350	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	40.742.667	100%	546.251.153.035			100%	277	100%	88			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	3 Dokumen	0		0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0		0	1 Dokumen	0					1 Dokumen				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	3 Laporan	42.616.850	1 Laporan	3.022.150	1 Laporan	19.797.350	1 Laporan	19.797.350	1 Laporan	2.672.064	1 Laporan	3.935.800			1 Laporan	88,42	1 Laporan	19,88			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	3 Laporan	76.289.200	1 Laporan	19.487.500	1 Laporan	28.400.850	1 Laporan	28.400.850	1 Laporan	19.476.500	1 Laporan	4.714.238			1 Laporan	99,94	1 Laporan	16,60			
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	124.566.300	1 Dokumen	20.962.700	1 Dokumen	51.801.800	1 Dokumen	51.801.800	1 Dokumen	18.594.103	1 Dokumen	26.859.413			1 Dokumen	88,70	1 Dokumen	51,85			
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen		1 Dokumen				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%	100%	1.262.319.509.092	100%	431.045.143.126	100%	415.637.182.983	100%	415.637.182.983	100%	438.442.736.203	100%	273.107.821.792			100%	287	100%	84			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan danPenyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	12 Laporan	1.217.304.826.100	4 Laporan	421.161.416.700	4 Laporan	398.071.704.700	4 Laporan	398.071.704.700	4 Laporan	428.674.752.118	4 Laporan	271.304.669.792			4 Laporan	101,78	4 Laporan	68,15			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	6 Laporan	8.804.657.000	2 Laporan	804.657.000	2 Laporan	4.000.000.000	2 Laporan	4.000.000.000	2 Laporan	688.914.659	2 Laporan	119.376.000			2 Laporan	85,62	2 Laporan	2,98			
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	12 Laporan	36.210.025.992	4 Laporan	9.079.069.426	4 Laporan	13.565.478.283	4 Laporan	13.565.478.283	4 Laporan	9.079.069.426	4 Laporan	1.683.776.000			4 Laporan	100,00	4 Laporan	12,41			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	2.413.035.850	100%	803.035.850	100%	805.000.000	100%	805.000.000	100%	493.776.402	100%	291.326.700			100%	228	100%	142			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	100%	100%	2.413.035.850	100%	803.035.850	100%	805.000.000	100%	805.000.000	100%	493.776.402	100%	291.326.700			100%	228	100%	142			
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	535.240.400	2 Dokumen	235.240.400	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	231.457.200	2 Dokumen	149.739.500			2 Dokumen	98,39	2 Dokumen	99,83			
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlagn Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan	42 Laporan	30.000.000	14 Laporan	0	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	0	14 Laporan			14 Laporan		14 Laporan					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	15 Dokumen	1.480.240.750	5 Dokumen	480.240.750	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	182.284.802	5 Dokumen	134.507.700			5 Dokumen	37,96	5 Dokumen	26,90			
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	12 Laporan	30.000.000	4 Laporan	0	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	0	4 Laporan	1.709.750			4 Laporan		4 Laporan	11,40			
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	12 Laporan	337.554.700	4 Laporan	87.554.700	4 Laporan	125.000.000	4 Laporan	125.000.000	4 Laporan	80.034.400	4 Laporan	4.499.000			4 Laporan	91,41	4 Laporan	3,60			
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	164 orang	492 orang	0	164 orang	0	164 orang		164 orang		164 orang	0	164 orang	870.750			164 orang		164 orang				
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	65	80	116.688.220.985	70	33.360.957.383	75	41.665.973.051	80	41.665.973.051	70	32.041.175.230	75	27.598.517.998			70	#DIV/0!	75	482			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90	95	11.483.627.260	92	3.996.837.000	93	3.693.395.130	95	3.793.395.130	92	3.788.965.608	93	2.252.578.805			92	242	93	151			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	80	85	128.171.848.245	82	37.357.794.383	83	45.359.368.181	85	45.459.368.181	82	35.830.140.838	83	29.851.096.803			82	#DIV/0!	83	632			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
							2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100%	100%	42.026.600	100%	7.056.600	100%	19.826.250	100%	19.826.250	100%	8.339.800	100%	601.000			100%	#DIV/0!	100%	18			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	8.670.150	2 Dokumen	2.727.650	2 Dokumen	2.971.250	2 Dokumen	2.971.250	2 Dokumen	2.005.500	2 Dokumen			2 Dokumen	73,52	2 Dokumen	0,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	7.947.850	1 Dokumen	1.215.850	1 Dokumen	3.366.000	1 Dokumen	3.366.000	1 Dokumen	1.202.500	1 Dokumen			1 Dokumen	98,90	1 Dokumen	0,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	7.818.700	1 Dokumen	1.086.700	1 Dokumen	3.366.000	1 Dokumen	3.366.000	1 Dokumen	1.084.800	1 Dokumen	601.000		1 Dokumen	99,83	1 Dokumen	17,86				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	4.715.500	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	2.357.750	1 Dokumen	2.357.750	1 Dokumen	2.023.500	1 Dokumen			1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	0,00				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	4.715.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2.357.750	1 Dokumen	2.357.750	1 Dokumen	0	1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	18 Laporan	8.158.900	6 Laporan	2.026.400	6 Laporan	3.066.250	6 Laporan	3.066.250	6 Laporan	2.023.500	6 Laporan					6 Laporan	99,86	6 Laporan			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	24 Laporan	0	8 Laporan	0	8 Laporan	2.341.250	8 Laporan	2.341.250	8 Laporan		8 Laporan					8 Laporan		8 Laporan			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah terlayani tepat waktu	100%	51Orang/bulan	114.700.838.005	100%	32.746.324.903	51Orang/bulan	40.977.256.551	51Orang/bulan	40.977.256.551	100%	31.458.107.990	51Orang/bulan	27.387.309.370			100%	294	51Orang/bulan	121			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51Orang/bulan	6 Laporan	114.669.981.205	51Orang/bulan	32.727.399.103	2 Laporan	40.971.291.051	2 Laporan	40.971.291.051	51Orang/bulan	31.439.431.390	2 Laporan	27.385.685.370			51Orang/bulan	96,06	2 Laporan	66,84			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12 Laporan	20.579.350	2 Laporan	13.776.850	4 Laporan	3.401.250	4 Laporan	3.401.250	2 Laporan	13.536.300	4 Laporan	912.000			2 Laporan	98,25	4 Laporan	26,81			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	51Orang/bulan	10.277.450	4 Laporan	5.148.950	51Orang/bulan	2.564.250	51Orang/bulan	2.564.250	4 Laporan	5.140.300	51Orang/bulan	712.000			4 Laporan	99,83	51Orang/bulan	27,77			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang teradministrasi dengan baik	100%	100%	12.567.700	100%	1.951.200	100%	5.308.250	100%	5.308.250	100%	1.904.200	100%	706.000			100%	98	100%	25			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	5.613.500	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2.806.750	1 Dokumen	2.806.750	1 Dokumen	0	1 Dokumen	706.000			1 Dokumen		1 Dokumen	25,15			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	42 Laporan	6.954.200	14 Laporan	1.951.200	14 Laporan	2.501.500	14 Laporan	2.501.500	14 Laporan	1.904.200	14 Laporan				14 Laporan	97,59	14 Laporan				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%	100%	42.219.463	100%	6.628.363	100%	17.795.550	100%	17.795.550	100%	5.826.000	100%	0			100%	88	100%	0			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3 Dokumen	14.307.963	1 Dokumen	6.628.363	1 Dokumen	3.839.800	1 Dokumen	3.839.800	1 Dokumen	5.826.000	1 Dokumen				1 Dokumen	87,90	1 Dokumen				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	6 Orang	20.000.000	2 Orang	0	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	0	2 Orang			2 Orang		2 Orang					
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	67 Orang	201 Orang	7.911.500	67 Orang	0	67 Orang	3.955.750	67 Orang	3.955.750	67 Orang	0	67 Orang			67 Orang		67 Orang					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum tepat waktu/sesuai standard/ketentuan	100%	100%	984.720.841	100%	348.251.341	100%	318.234.750	100%	318.234.750	100%	355.229.084	100%	171.104.618			100%	651	100%	268			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Paket	15.614.200	4 Paket	5.614.200	4 Paket	5.000.000	4 Paket	5.000.000	4 Paket	4.737.350	4 Paket	457.500			4 Paket	84,38	4 Paket	9,15			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	54 Paket	224.784.385	18 Paket	64.784.385	18 Paket	80.000.000	18 Paket	80.000.000	18 Paket	60.625.300	18 Paket	23.797.000			18 Paket	93,58	18 Paket	29,75			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	40.170.000	1 Paket	10.170.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	9.486.000	1 Paket	1.960.000			1 Paket	93,27	1 Paket	13,07			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	239.821.000	1 Paket	79.821.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	77.350.000	1 Paket	78.649.050			1 Paket	96,90	1 Paket	98,31			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3 Dokumen	16.860.000	1 Dokumen	4.860.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	3.840.000	1 Dokumen	1.880.000			1 Dokumen	79,01	1 Dokumen	31,33			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	12 Laporan	28.500.000	4 Laporan	10.500.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.934.100	4 Laporan	3.196.500			4 Laporan	94,61	4 Laporan	35,52			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan	412.501.756	4 Laporan	172.501.756	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	189.256.334	4 Laporan	61.164.568			4 Laporan	109,71	4 Laporan	50,97			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6 Dokumen	6.469.500	2 Dokumen	0	2 Dokumen	3.234.750	2 Dokumen	3.234.750	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0			2 Dokumen		2 Dokumen				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi	100%	100%	130.000.000	100%	0	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	0	100%	0			100%	0	100%	0			
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30 Unit	130.000.000	10 Unit	0	10 Unit	65.000.000	10 Unit	65.000.000	10 Unit	0	10 Unit				10 Unit		10 Unit				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	11.483.627.260	100%	3.996.837.000	100%	3.693.395.130	100%	3.793.395.130	100%	3.788.965.608	100%	2.252.578.805			100%	242	100%	151			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12 Laporan	5.500.000	4 Laporan	500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	2.500.000	4 Laporan	234.270	4 Laporan	712.200			4 Laporan	46,85	4 Laporan	28,49			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	788.192.000	4 Laporan	248.492.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	269.850.000	4 Laporan	249.610.360	4 Laporan	165.534.265			4 Laporan	100,45	4 Laporan	61,34			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	12 Laporan	10.689.935.260	4 Laporan	3.747.845.000	4 Laporan	3.421.045.130	4 Laporan	3.521.045.130	4 Laporan	3.539.120.978	4 Laporan	2.086.332.340			4 Laporan	94,43	4 Laporan	60,99			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	100%	775.848.376	100%	250.744.976	100%	262.551.700	100%	262.551.700	100%	211.768.156	100%	38.797.010			100%	351	100%	49			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	66 Unit	294.434.300	22 Unit	103.434.300	22 Unit	95.500.000	22 Unit	95.500.000	22 Unit	88.739.325	22 Unit	24.301.004			22 Unit	85,79	22 Unit	25,45			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	153 Unit	211.513.140	51 Unit	69.393.140	51 Unit	71.060.000	51 Unit	71.060.000	51 Unit	51.298.831	51 Unit	9.117.006			51 Unit	73,92	51 Unit	12,83			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit	501 Unit	179.378.620	167 Unit	67.917.536	167 Unit	55.730.542	167 Unit	55.730.542	167 Unit	61.730.000	167 Unit	3.855.000			167 Unit	90,89	167 Unit	6,92			

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kab/kota Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke						Rasio Capaian pada Tahun ke						Unit Penanggungjawab
							2024		2025		2026		2024		2025		2026	2024		2025		2026			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	90.522.316	1 Unit	10.000.000	1 Unit	40.261.158	1 Unit	40.261.158	1 Unit	10.000.000	1 Unit	1.524.000			1 Unit	100,00	1 Unit	3,79			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																									
Faktor penghambat:																									
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																									
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:																									

Bangkalan, 18 September 2025

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN



AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003